

PENGAWASAN DEPOT AIR MINUM BERDASARKAN PASAL 9 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 651/MPP/Kep/10/2004 TENTANG PERSYARATAN DEPOT AIR MINUM DAN PERDAGANGANNYA DI KOTA MOJOKERTO

Rosa Lisa Rachmawati

11040704209 (Prodi S1 Ilmu Hukum, FISH, UNESA) oochachan@gmail.com

Arinto Nugroho S.Pd., S.H., M.H

1981101032005011002 (Prodi S1 Ilmu Hukum, FISH, UNESA) arintonugroho.13@gmail.com

Abstrak

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Depot Air Minum dan Perdagangan pada pasal 9, bertujuan untuk memenuhi perlindungan terhadap konsumen air minum. Seyogyanya pelaksanaan dilapangan tidak selalu seperti yang diharapkan pembuat peraturan perundang – undangan. Salah satunya pelaku usaha air minum di kota Mojokerto yang terbukti masih ada yang belum melakukan pengawasan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang pelaksanaan pengawasan dan kendala yang dihadapi pada saat pengawasan terhadap depot air minum di kota Mojokerto. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis/empiris. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan wawancara terhadap informan. Observasi dilakukan agar peneliti dapat mengetahui secara langsung kondisi depot air minum yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Wawancara dilakukan terhadap beberapa informan yaitu staf bidang pencegahan penyakit dan pembinaan lingkungan dan pelaku usaha depot air minum di Kota Mojokerto. Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yakni menjabarkan data yang tersedia kemudian melakukan uraian dan penafsiran dengan kalimat – kalimat sehingga diperoleh bahasan atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan depot air minum di Kota Mojokerto sudah dilaksanakan oleh dinas kesehatan Kota Mojokerto. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Mojokerto kurang efektif karena terdapat kendala pada pelaksanaan pengawasan ini. Kendala tersebut adalah kurangnya kesadaran pedagang untuk mematuhi peraturan yang ada, sehingga banyak depot air minum yang melanggar peraturan. Kendala lain yang dirasakan oleh Dinas Kesehatan Kota Mojokerto adalah ada beberapa pelaku usaha depot air minum yang tidak ingin memeriksakan kualitas airnya di laboratorium kesehatan daerah Kota Mojokerto karena tarif terlalu mahal.

Kata Kunci: Pengawasan, Depot Air Minum, Kota Mojokerto

Abstract

The Decree of The Minister of Industry and Trade No. 651/MPP/Kep/10 2004 concerning the Requirement of Depots and Trade of Drinking Water is to fullfil the consumer to receive the protection in consuming drinking water. The implementations is not always expected by regulator. Some of business practitioners still do not control their drinking water depot. The purposes of this reaserch are to know the implementation of the supervision and the obtacles of drinking water depot. This research uses socio-juridical or empirical research design. The analysis used in this research is descriptive qualitative method. The data were collected by using observation, documentation and interviews from the informants. The observation was conducted by researchers to directly determine the condition of drinking water depot according to the laws. Interviews were conducted to gain the data from several informants, like disease prevention staffs and environmental development as well as business practitioner of drinking water depot in Mojokerto. Data collected are analyzed qualitatively. The result of this reaserch showed that the drinking water depots have been supervised by the health departement of Mojokerto. The supervision by the health department is not effective because there are obstacles on the implementation. The obstacle are the business practitioners seem to ignore the regulations so that many drinking water depot that break the regulations. The other obstacle is there some drinking water depot who do not want to check the quality of the water in the local health laboratories since the cost is too expensive.

Keywords: Supervising, Drinking Water Storehouses, Mojokert city

PENDAHULUAN

Manusia setiap harinya mengkonsumsi air untuk kebutuhan tubuh dan kelangsungan hidup. Kategori air yang aman dan dapat dikonsumsi oleh manusia harus memenuhi beberapa spesifikasi yaitu :

Aspek kelayakan untuk sebuah air minum adalah air harus tidak berasa dan tidak berbau untuk dikonsumsi oleh konsumen. Dalam menilai mutu air minum, pada dasarnya para konsumen mengandalkan indra mereka. Konstituen mikroba, kimiawi, dan fisik air dapat mempengaruhi tampilan, bau atau rasa air; dan para konsumen akan menilai mutu dan kelayakan air berdasarkan kriteria tersebut. Walaupun substansi tersebut tidak memiliki efek langsung pada kesehatan, air yang sangat keruh, sangat berwarna atau memiliki rasa atau bau yang sangat tidak menyenangkan, akan dianggap tidak aman oleh para konsumen dan mungkin tidak akan dikonsumsi. Pada kondisi ekstrem, konsumen mungkin akan menghindari air dari sumber yang aman, tetapi tampilan estetikanya tidak menyenangkan, dan mereka lebih memilih air yang sumbernya tidak aman, tetapi memiliki tampilan estetik yang menyenangkan¹

Air dengan tampilan yang tampak jernih dan tidak berbau akan lebih dipilih oleh konsumen karena konsumen menganggap air tersebut aman untuk dikonsumsi, akan tetapi konsumen bisa saja tertipu dengan tampilan air minum yang jernih dan tidak berbau tetapi air tersebut membahayakan bagi kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dalam pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa melalui proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, persyaratan kualitas air minum untuk seluruh penyelenggara air minum wajib memenuhi persyaratan fisik, mikrobiologis, kimia dan radioaktif.

Aspek hukum perlindungan konsumen terhadap munculnya usaha air minum isi ulang dapat dilihat pada beberapa pasal dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut dengan UUPK), yaitu terdapat pada UUPK pasal 4 huruf a dan c, Pasal 7 huruf b dan d, serta pasal 8 yang mengatur tentang segala perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

Perlindungan konsumen air isi ulang, selain di dalam UUPK, pemerintah melalui Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia mengeluarkan sebuah keputusan yaitu Keputusan Menteri Perindustrian

dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Depot Air Minum dan Perdaganganannya pasal 8 yang menyebutkan bahwa pengawasan mutu produk dilakukan oleh laboratorium kesehatan daerah. Laboratorium yang ditunjuk pemerintah Kabupaten/Kota bertugas untuk mengawasi mutu produk Depot Air Minum. Pengawasan yang dilakukan oleh laboratorium adalah pemeriksaan terhadap mutu prooduk air minum yang berupa pemeriksaan bakteriologi dan pemeriksaan kimiawi yang terkandung dalam air baku.

Kewenangan pengawasan terhadap keseluruhan depot air minum terdapat dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 pasal 9 yaitu

Pengawasan yang dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/ Walikota dilimpahkan kepada Kepala Unit Kerja sesuai dengan Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab. Kepala unit kerja yang menerima tanggung jawab untuk pengawasan depot air minum di Kota Mojokerto adalah Dinas Kesehatan Kota Mojokerto. Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum dilakukan oleh Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Mojokerto.

faktanya masih terdapat pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan tentang depot air minum. pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha umumnya seperti memiliki *stock* air minum yang telah dikemas sebelum konsumen datang, selain itu masih terdapat pelaku usaha yang belum memeriksakan kualitas bakteriologi dan kimiawi airnya di dinas kesehatan kota mojokerto. Dalam penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pelaksanaan pengawasan berdasarkan pasal 9 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Depot Air Minum dan Perdaganganannya di Kota Mojokerto? (2) Kendala apa saja yang dihadapi oleh dinas kesehatan dalam pelaksanaan pasal 9 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Depot Air Minum dan Perdaganganannya di Kota Mojokerto?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap depot air minum yang berada di Kota Mojokerto, serta kendala dalam pelaksanaan pengawasan terhadap depot air minum di Kota Mojokerto.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis, yang mana mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat interaksi

¹ Palupi Widyastuti, Apriningsih, Buku Kedokteran EGC, 200. hlm. 11

dengan sistem norma yang ada. Cara memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.²

Lokasi Pada penelitian ini diantaranya Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, Laboratorium Kesehatan Kota Mojokerto dan depot air minum di Kota Mojokerto.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara kepada informan Dinas Kesehatan Kota Mojokerto dan pelaku usaha depot air minum di Kota Mojokerto, observasi dan dokumentasi.³ Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan diantaranya buku, jurnal dan referensi lainnya.

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah tahap pengolahan data. Dalam penelitian ini, peneliti harus memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari informan, terutama kelengkapan jawaban yang diterima.⁴ Data dalam penelitian ini harus dikualifikasi, artinya semua data harus ditempatkan dalam kategori – kategori.

Teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu peneliti menganalisis untuk memaparkan atas subjek atau penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.⁵

Pendekatan analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata.⁶ Proses ini akan dilakukan dengan cara berpikir induktif yaitu menarik kesamaan nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai fakta yang selanjutnya dirumuskan secara umum tentang pelaksanaan Pasal 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 Tentang Persyaratan Depot Air Minum Dan Perdaganganannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Dinas Kesehatan Kota Mojokerto dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Mojokerto

Penelitian tentang pengawasan depot air minum di kota Mojokerto ini dilakukan pada tanggal 29 Desember

2015. Komponen wawancara yang digunakan oleh peneliti meliputi pelaksanaan pengawasan depot air minum di Kota Mojokerto, pengujian kualitas air di depot air minum, proses setelah pengujian kualitas air depot air minum dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Mojokerto.

Pelaksanaan pengawasan depot air minum di Kota Mojokerto dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Mojokerto, dan Unit Pelayanan Teknis Daerah Puskesmas. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Mojokerto merupakan bentuk pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 adalah pengawasan yang dilakukan terhadap air minum dengan sistem jaringan perpipaan, depot air minum, air minum bukan jaringan perpipaan untuk tujuan komersial dan bukan komersial oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Pengawasan terhadap depot air minum yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Mojokerto diadakan setiap satu tahun sekali. Depot air minum yang ada di Kota Mojokerto semuanya dibina dan diawasi oleh Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, oleh karena itu Dinas Kesehatan Kota Mojokerto dalam melaksanakan tugasnya, maka Dinas Kesehatan Kota Mojokerto datang ke masing – masing depot air minum yang ada di Kota Mojokerto.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan di masing – masing depot air minum meliputi pembinaan dan pengambilan sampel untuk uji petik. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Mojokerto berupa memberikan pengetahuan tentang perawatan depot air minum yang baik dan benar. Dinas kesehatan dalam melaksanakan tugas pembinaan, selain memberikan pengetahuan tentang perawatan depot air minum yang baik dan benar, juga memberikan solusi permasalahan terhadap depot air minum yang memiliki kesulitan dalam mengelola depot air minumnya.

Pelaksanaan pengawasan depot air minum di Kota Mojokerto dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Mojokerto setiap satu tahun sekali, akan tetapi untuk kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi air dari depot air minum, unit pelayanan teknis daerah puskesmas juga ikut melakukan pengawasan terhadap depot air minum.

Proses pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Mojokerto berbeda dengan proses pengawasan yang dilakukan oleh Puskesmas pembantu yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kota Mojokerto. Proses pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Mojokerto berupa pembinaan terhadap menjalankan

²Mukti Fajar .2013. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm 153.

³*Ibid*. hlm 156.

⁴Mukti Fajar, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, *Op. cit* hlm. 181

⁵*Ibid* hlm 183

⁶*Ibid* hlm 192

usaha depot air minum yang baik dan benar serta pengawasan terhadap kualitas air dari depot air minum yang ada di Kota Mojokerto. Pengawasan terhadap kualitas air, Dinas Kesehatan Kota melakukan uji petik untuk mengetahui kualitas air minum di Kota Mojokerto. Uji petik untuk mengetahui kualitas air minum di Kota Mojokerto oleh Dinas Kesehatan Kota Mojokerto dilakukan oleh sanitarian bersama petugas laboratorium kesehatan daerah.

2. Pelaku Usaha Depot Air Minum di Kota Mojokerto

Depot air minum di Kota Mojokerto wajib mengajukan permohonan sertifikat laik higiene sanitasi depot air minum di Dinas Kesehatan kota Mojokerto. Kegunaan utama dari sertifikasi tersebut adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Izin Usaha Depot air minum. Sertifikat laik higiene dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto. Sertifikat laik higiene sanitasi dikeluarkan setelah usaha depot air minum memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

Sertifikat laik higiene sanitasi akan dikeluarkan jika pelaku usaha telah memenuhi keempat aspek yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum pasal 3 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Keempat aspek yang telah terpenuhi, maka akan terbit sertifikat laik higiene sanitasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan dari Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, setelah sertifikat laik Higiene Sanitasinya keluar, pelaku usaha harus memeriksakan sample airnya secara rutin dengan membuat pernyataan bermaterai, hasil dari sampel yang diperiksakan harus memenuhi syarat. Air yang diperiksakan secara rutin oleh pelaku usaha harus memenuhi syarat, jika tidak memenuhi syarat selama tiga kali berturut – turut, maka sertifikat laik higiene sanitasi akan dicabut.

Pemeriksaan setiap bulannya, para pelaku usaha harus memeriksakan sendiri air yang dijualnya ke laboratorium. Pelaku usaha harus rutin setiap bulannya memeriksakan air yang ada di depot air minumnya, pemeriksaan air tersebut dilakukan oleh laboratorium dan para pelaku usaha dikenakan biaya sebesar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah).

Penelitian tentang pengawasan terhadap depot air minum di Kota Mojokerto ini dilakukan pada tanggal 12 Februari 2016 dan 13 Februari 2016. Pada tanggal 12 Februari 2016 peneliti melakukan survei untuk menentukan depot air minum mana saja yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh peneliti. Pada

tanggal 13 Februari peneliti melakukan wawancara dan observasi di depot air minum yang terpilih.

Wawancara dan observasi pertama dilakukan dengan pelaku usaha depot air minum yang berasal dari lingkungan puskesmas Blooto. Wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa pelaku usaha tersebut mengetahui tentang adanya kewajiban memeriksakan air di laboratorium kesehatan daerah kota Mojokerto. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pelaku usaha tersebut, pelaku Usaha tersebut rutin memeriksakan kandungan airnya. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut empat bulan sekali. Kewajiban untuk memeriksakan kualitas air diketahui oleh pelaku usaha melalui sosialisasi langsung dari Dinas Kesehatan kota Mojokerto.

Pelaku usaha tersebut memberikan sedikit informasi, untuk depot air minum yang baru saja membuka usahanya, Dinas Kesehatan akan rutin setiap bulan mengunjungi depot air minum tersebut untuk memeriksa kandungan bakteriologi air di depot air minum yang baru saja membuka usahanya tersebut. Depot air minum yang baru saja membuka usaha air minumnya akan diawasi secara teratur oleh Dinas Kesehatan Kota Mojokerto selama kurang lebih tiga bulan, setelah itu depot air minum tersebut dilepas dan diberi tanggung jawab untuk memeriksakan kualitas air minumnya secara mandiri di Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Mojokerto.

Tanggapan pelaku usaha tersebut mengenai adanya pengawasan terhadap depot air minum sangat baik. Sayangnya pelaku usaha tersebut memeriksakan kandungan airnya selama empat bulan sekali yang seharusnya air tersebut diperiksakan setiap satu bulan sekali. Pelaku usaha tersebut tidak keberatan atas tarif yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan. Pelaku usaha juga tidak ada keluhan apapun tentang pengawasan yang dilaksanakan oleh dinas kesehatan.

Pelaku usaha sebagaimana tersebut diatas memang tidak keberatan atas tarif yang dikeluarkan dan tidak ada keluhan terhadap pengawasan depot air minum namun sayangnya pedagang tersebut tidak tahu sanksi apa yang akan diberikan jika ada depot air minum yang melanggar peraturan.

Hasil wawancara berikutnya dilakukan peneliti di hari yang sama yaitu pada tanggal 13 Februari 2016. Pelaku usaha kedua di bawah pengawasan dan binaan Puskesmas Mentikan. Hasil wawancara menyebutkan bahwa pelaku usaha mengetahui mengenai kewajiban tentang memeriksakan air yang dijualnya ke Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Mojokerto. Pelaku usaha tersebut mengetahui kewajiban tersebut dari sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota

Mojokerto. Pelaku usaha tersebut telah memeriksakan kandungan airnya di Laboratorium Kesehatan daerah.

Pelaku usaha tersebut mengaku bahwa telah memeriksakan airnya di Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Mojokerto kurang dari tiga bulan, dalam periode Januari 2015 sampai Desember 2015, pelaku usaha tersebut sudah terhitung tiga kali memeriksakan airnya di laboratorium kesehatan daerah, selain rutin memeriksakan kandungan air nya, pelaku usaha tersebut tidak merasa keberatan atas tarif yang dipatok oleh Dinas Kesehatan Kota Mojokerto.

Pelaku usaha tersebut selain mengetahui tentang kewajibannya untuk melakukan uji airnya secara rutin, pelaku usaha tersebut juga mengetahui tentang sanksi apa yang akan diberikan kepada depot air minum yang telah melanggar peraturan perundang – undangan, menurut pengakuan pelaku usaha tersebut, sanksi tersebut berupa sanksi yang berada di Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang persyaratan teknis depot air minum dan perdaganganannya.

Pelaku usaha kedua ini berpendapat bahwa pengawasan maupun pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Mojokerto maupun pengawasan yang dilakukan oleh Puskesmas Mentikan sudah cukup baik. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh puskesmas mentikan khususnya, dirasa sangat baik oleh pelaku usaha kedua ini, karena pihak puskesmas selalu melakukan pemeriksaan dengan teliti dan sungguh – sungguh. Apabila ada sesuatu yang tidak benar sedikit saja para pemeriksa langsung membenarkan kesalahan tersebut.

Hasil wawancara ketiga dilakukan peneliti di hari yang sama yaitu pada tanggal 13 Februari 2016. Pelaku usaha ketiga di bawah pengawasan dan binaan Puskesmas Kedundung. Hasil wawancara dengan pelaku usaha tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha tersebut tahu tentang kewajiban memeriksakan air di Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Mojokerto. Pelaku Usaha Tersebut mengetahui informasi tentang pemeriksaan air tersebut dari sosialisasi yang dilakukan oleh dinas kesehatan.

Pelaku usaha tersebut mengaku sudah memeriksakan air yang dijualnya, akan tetapi jarak pelaku usaha tersebut memeriksakan airnya sudah lama, sudah sekitar enam bulan lebih pelaku usaha tersebut tidak melakukan pemeriksaan terhadap air yang dijualnya. Pelaku usaha yang menjadi objek penelitian ketiga ini belum memeriksakan depot air minumnya selama enam bulan lebih pada periode Januari 2015 sampai dengan Desember 2015.

Pelaku usaha tersebut mengaku bahwa alasan ia tidak melakukan pemeriksaan air nya adalah karena

keberatan atas biaya yang dipatok oleh dinas kesehatan. Menurut pengakuan pelaku usaha tersebut biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan. Setiap bulannya harus mengeluarkan uang Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) untuk pemeriksaan bakteriologi, selain setiap bulan, setiap enam bulan sekali pelaku usaha harus mengeluarkan uang sebanyak Rp.220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pemeriksaan kimiawi. Dinas kesehatan sudah memberi keringanan untuk pemeriksaan kimiawi yang boleh dilakukan satu tahun sekali, tetapi tetap saja dirasa berat oleh pelaku usaha tersebut.

Hasil wawancara berikutnya dilakukan peneliti di hari yang sama yaitu pada tanggal 13 Februari 2016. Pelaku usaha keempat dibawah pengawasan dan binaan Puskesmas Gedongan. Hasil wawancara dengan pelaku usaha tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha tersebut tahu tentang kewajiban memeriksakan air di Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Mojokerto. Pelaku Usaha Tersebut mengetahui informasi tentang pemeriksaan air tersebut dari sosialisasi yang dilakukan oleh dinas kesehatan.

Pelaku usaha keempat ini mengaku sudah memeriksakan airnya kurang dari 3 bulan yang lalu. Pelaku usaha tersebut menyebutkan bahwa ia terakhir kali memeriksakan airnya pada bulan Oktober 2015 dalam kurun waktu hingga Januari tahun 2016. Pelaku usaha mengaku tidak ada keluhan terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dinas kesehatan maupun puskesmas. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh puskesmas maupun Dinas Kesehatan tidak ada masalah menurut pelaku usaha. Pelaku usaha keempat ini mengetahui tentang adanya sanksi yang diterapkan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan tentang pemeriksaan yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha setiap bulannya.

Pembahasan

A. Pelaksanaan Pengawasan Depot Air Minum di Kota Mojokerto

Pengawasan depot air minum dalam hal ini terdapat dua macam pengawasan yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Mojokerto dan pengawasan internal dilakukan oleh para pelaku usaha depot air minum itu sendiri.

Pengawasan internal yang dilakukan oleh para penyelenggara air minum atau para pelaku usaha depot air minum berupa pengawasan terhadap kualitas air minumnya yang dilakukan setiap bulan dengan cara memeriksakan kualitas bakteriologi nya kepada laboratorium kesehatan daerah Kota Mojokerto. Pemeriksaan kualitas air tidak hanya kualitas

bakteriologisnya saja melainkan pengawasan kimiawi juga.

Pemeriksaan kualitas kimiawi air minum dapat dilakukan setiap enam bulan sekali oleh para pelaku usaha. Pengawasan internal harus selalu dilakukan oleh para pelaku usaha untuk menjaga kualitas air minumnya agar tidak merugikan konsumen yang meminumnya. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan sendirinya termasuk dalam pengawasan internal.

Pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam rangka melindungi konsumen depot air minum terdapat pada pasal 8 dan 9 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya. Pasal 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya

Hasil penelitian di kota Mojokerto tentang pengawasan terhadap depot air minum menunjukkan bahwa di kota Mojokerto pengawasan dilimpahkan kepada unit kerja yang berwenang yaitu Dinas Kesehatan Kota Mojokerto yang dilaksanakan oleh Bidang Pencegahan Penyakit dan Pembinaan Lingkungan (yang selanjutnya disebut P2PL). Pelaksanaan pengawasan terhadap depot air minum di Kota Mojokerto dilaksanakan oleh Puskesmas pembantu dinas kesehatan di Kota Mojokerto. Puskesmas yang ditunjuk oleh dinas kesehatan terdapat 5 puskesmas yaitu Puskesmas Mentikan, Puskesmas Kedundung, Puskesmas Wates, Puskesmas Blooto dan Puskesmas Gedongan.

Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai pengemban upaya kesehatan dalam hal pengemban kader pembantu bidang kesehatan di wilayah dan pengemban kegiatan swadaya masyarakat. Fungsi lain Puskesmas adalah Pembinaan upaya kesehatan, peran serta masyarakat, koordinasi semua upaya kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, pelaksanaan rujukan medik, pemantauan sarana dan pembinaan teknis kepada puskesmas pembantu, unit pelayanan kesehatan swasta dan kader pembantu kesehatan.

Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan depot air minum di Kota Mojokerto sudah baik. Pelaksanaan pengawasan depot air minum tersebut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum pasal 4 disebutkan bahwa pengawasan kualitas air minum dilakukan oleh Dinas Kesehatan, akan tetapi di Kota Mojokerto Pengawasan dan Pembinaan terhadap kualitas air di depot air minum dilakukan oleh Puskesmas dengan intensitas pengawasan dan pembinaan satu tahun

bisa mencapai dua hingga tiga kali pengawasan dan pembinaan.

Hasil penelitian terhadap pelaku usaha menyatakan bahwa pelaku usaha sudah mengerti dan paham tentang pemeriksaan air setiap bulannya, akan tetapi dari hasil wawancara, para pelaku usaha pemeriksaan bakteriologis tiga bulan sekali, empat bulan sekali bahkan ada pelaku usaha yang belum memeriksakan airnya selama enam bulan lebih. Pelaku usaha depot air minum di Kota Mojokerto sudah mengerti tentang adanya kewajiban memeriksakan kandungan bakteriologi airnya. Pengetahuan tentang kewajiban untuk memeriksakan airnya tersebut diketahui oleh pedagang dari sosialisasi yang dilakukan oleh dinas kesehatan.

Para pelaku usaha depot air minum di Kota Mojokerto mengetahui tentang adanya peraturan yang mengatur tentang pemeriksaan air di laboratorium kesehatan daerah Kota Mojokerto, akan tetapi para pelaku usaha tersebut tidak menjalankan apa yang tercantum dalam peraturan tersebut dengan kata lain para pelaku usaha tersebut tidak memeriksakan kualitas airnya di laboratorium kesehatan daerah Kota Mojokerto, jika para pelaku usaha tersebut tidak memeriksakan kualitas airnya maka pelaku usaha tersebut tidak mematuhi kaedah hukum yang ada. Pengertian dari kaedah hukum sendiri adalah :

Kaedah hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogyanya atau seharusnya dilakukan. Pada hakekatnya hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan bagaimana seharusnya atau seyogyanya seorang bertindak laku.⁷

Peraturan yang ada tentang kewajiban memeriksakan kualitas air minum di Laboratorium Kesehatan daerah Kota Mojokerto merupakan peraturan yang harus dipatuhi. Peraturan yang harus dipatuhi ini termasuk dalam kaedah hukum yang berisi perintah. Kaedah hukum yang berisi perintah merupakan kaedah hukum yang mau tidak mau harus dijalankan atau ditaati.⁸

Pemeriksaan kualitas air minum dengan tepat waktu oleh para pelaku usaha depot air minum dilakukan semata – mata untuk melindungi konsumen agar tidak ada korban dalam mengkonsumsi air dari depot air minum tersebut.

Kaedah hukum ditunjukkan terutama kepada pelakunya yang konkrit yaitu si pelaku pelanggaran yang nyata – nyata berbuat, bukan untuk penyempurnaan manusia, melainkan untuk ketertiban masyarakat agar masyarakat tertib, agar

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, penerbit : Liberty Yogyakarta, hlm 15

⁸ Ibid hlm 31

jangan sampai jatuh korban kejahatan, agar tidak terjadi kejahatan.⁹

Kaedah hukum ditunjukkan kepada pelakunya yang konkrit yaitu para pelaku usaha depot air minum di kota Mojokerto untuk ketertiban para pelaku usaha agar jangan sampai jatuh korban setelah mengkonsumsi air dari depo air isi ulang.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan tidak mencari – cari kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha, karena pada dasarnya, sebuah pengawasan memang tidak untuk mencari – cari kesalahan. Pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai upaya pencegahan maupun penindakan terhadap terjadinya segala bentuk penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Pengawasan hanya berfungsi sebagai upaya untuk memberi dorongan bagi perbaikan dan penyempurnaan.

Pengawasan haruslah memiliki sebuah norma untuk dijadikan sebuah tolak ukur untuk melakukan pengawasan. Norma pengawasan adalah patokan, kaidah atau ukuran yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang yang harus diikuti dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan agar dicapai mutu pengawasan yang dikehendaki.¹⁰

Norma pengawasan yang dapat dikaitkan dengan hal ini adalah pengawasan tidak mencari cari kesalahan, yaitu tidak mengutamakan mencari siapa yang salah, tetapi apabila ditemukan kesalahan, penyimpangan dan hambatan supaya dilaporkan, sebab – sebab bagaimana terjadinya, serta menemukan cara bagaimana memperbaikinya. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Mojokerto dalam melakukan pengawasan tidaklah mencari – cari kesalahan yang dilakukan oleh para pelaku usaha.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika ada pelanggaran di depot air minum di Kota Mojokerto, Dinas kesehatan hanya akan memberikan teguran. Dinas Kesehatan selain memberikan teguran terhadap pelaku usaha depot air minum, Dinas Kesehatan juga memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha depot air minum yang sedikit tidak mau mentaati peraturan yang ada.

Pembinaan yang dilakukan Dinas Kesehatan kota Mojokerto terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha depot air minum biasanya dibarengi dengan solusi pemecahan masalah. Solusi pemecahan masalah tersebut dilakukan Dinas Kesehatan kota Mojokerto untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha depot air minum. Pemberian solusi oleh

Dinas Kesehatan Kota Mojokerto terhadap masalah yang dialami oleh pelaku usaha sesuai dengan norma pengawasan dimana pengawasan harus menjamin adanya kemungkinan pengambilan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan, untuk mencegah berlanjutnya kesalahan atau penyimpangan.¹¹

B. Kendala Pada Pengawasan yang Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Kota Mojokerto Terhadap Depot Air Minum

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dapat dijabarkan kendala yang dialami oleh dinas kesehatan dalam mengawasi depot air minum adalah Pelaku usaha terlalu takut untuk memeriksakan kandungan airnya. Pelaku Usaha terlalu takut untuk memeriksakan kandungan airnya karena mereka takut jika hasil pemeriksaan air mereka buruk mereka berfikir izin usahanya akan segera dicabut. Ketakutan pelaku usaha itulah yang membuat pelaku usaha enggan untuk memeriksakan kandungan airnya. Kemalasan pelaku usaha untuk memeriksakan airnya inilah menjadi indikasi bahwa kesadaran hukum pelaku usaha kurang.

Pelaku usaha sudah mengetahui aturan untuk memeriksakan kandungan bakteriologis dan kimiawi airnya, akan tetapi mereka tidak tepat waktu untuk memeriksakan kandungan airnya. Perbuatan pelaku usaha tersebut termasuk pelaku usaha sudah memiliki pengetahuan hukum tapi tidak memiliki pemahaman kaidah – kaidah hukum yang menyatakan bahwa masyarakat mulai menghayati isi aturan – aturan yang berlaku di dalam masyarakat dan mulai menganalisa tentang tujuan dan tugas hukum.¹²

Kendala lain yang dialami oleh Dinas Kesehatan adalah disebabkan oleh para pelaku usaha yang merasa keberatan atas tarif yang dipatok oleh Dinas Kesehatan Kota Mojokerto. Setiap bulannya pelaku usaha harus memeriksakan kandungan bakteriologisnya dengan tarif sebesar Rp.45.000 (empat puluh lima ribu rupiah), dan untuk pemeriksaan kimiawi yang dilakukan enam bulan satu kali dikenakan tarif sebesar Rp. 220.000 (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Keberatan atas tarif yang dirasakan oleh para pelaku usaha depot air minum di Kota Mojokerto inilah yang menjadi salah satu kendala yang dialami oleh Dinas Kesehatan Kota Mojokerto. Semakin banyak pelaku usaha depot air minum yang merasa keberatan dengan tarif pemeriksaan air, semakin banyak pula pelaku usaha depot air minum yang tidak mau atau sengaja mengulur waktu untuk memeriksakan kandungan airnya.

⁹ Ibid hlm 12

¹⁰ Sujanto. 1989. *Norma dan Etika Pengawasan*, Jakarta, Penerbit : Sinar Grafika hlm 8

¹¹ Ibid hlm 8

¹² Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum, op. cit.* hlm 67

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai pengawasan terhadap depot air minum di kota Mojokerto, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pengawasan terhadap depot air minum berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya pasal 9 dilaksanakan oleh Gubernur yang dalam pelaksanaannya melakukan koordinasi dengan Bupati atau Walikota untuk melaksanakan di daerah kabupaten atau kota sesuai wilayah kerjanya. Pengawasan terhadap depot air minum di Kota Mojokerto dilaksanakan oleh Walikota yang dilimpahkan kepada Dinas Kesehatan Kota Mojokerto untuk melaksanakan pengawasan tersebut.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Mojokerto sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/MENKES/PER/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum. Dinas Kesehatan Kota Mojokerto dalam melaksanakan tugas pengawasannya, dilakukan oleh puskesmas. Puskesmas bertugas sebagai pelaksana pengawasan terhadap depot air minum di Kota Mojokerto. Puskesmas dalam melaksanakan tugas pengawasannya dilakukan dengan cara melakukan pengawasan dan pembinaan dengan mendatangi depot air minum.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Mojokerto berjalan Kurang efektif dikarenakan terdapat kendala – kendala yang harus dihadapi oleh Dinas Kesehatan seperti para pelaku usaha depot air minum yang merasa keberatan atas tarif yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Mojokerto.

Kendala dalam pelaksanaan pengawasan yang dialami oleh Dinas Kesehatan berupa kendala eksternal saja yaitu para pelaku usaha depot air minum yang kurang mematuhi peraturan yang ada. Para pelaku usaha depot air minum di Kota Mojokerto tidak patuh terhadap peraturan yang ada yaitu memeriksakan kualitas air minum yang dijualnya setiap satu bulan sekali untuk pemeriksaan bakteriologi dan enam bulan sekali untuk pemeriksaan kimiawi.

B. Saran

Beberapa hal berikut ini dapat dijadikan saran atau sebuah masukan untuk semua pihak yang terkait dengan Pelaksanaan Pengawasan depot air minum di Kota Mojokerto :

Bagi Dinas Kesehatan Kota Mojokerto dalam menyelenggarakan kegiatan pengawasan lebih meningkatkan kegiatan lagi dalam memberikan informasi mengenai peraturan perundang – undangan yang

mengatur tentang depot air minum maupun mengawasi depot air minum. Dinas Kesehatan Kota Mojokerto diharapkan untuk bisa memberikan informasi tentang sanksi – sanksi kepada para pelaku usaha depot air minum. Dinas Kesehatan Kota Mojokerto hendaknya mensosialisasikan tentang sanksi apa saja yang akan dikenakan pada depot air minum yang melanggar peraturan, karena berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha, masih ada pelaku usaha yang tidak mengerti tentang sanksi dalam pelaksanaan pengawasan depot air minum tersebut.

Pelaku usaha depot air minum di Kota Mojokerto, hendaknya lebih taat terhadap peraturan yang ada. Pelaku usaha depot air minum di Kota Mojokerto hendaknya untuk meningkatkan kesadaran untuk melaksanakan kewajiban pemeriksaan kualitas air minumnya di Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Mojokerto, agar konsumen yang mengkonsumsi air minum merasa aman dan nyaman.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asmadi, dkk, 2011, *Teknologi Pengelolaan Air Minum*, Pontianak : Gosyen Publishing.
- Fajar Mukti. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Friedman, Lawrence M. 2013, *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial*. Bandung, Penerbit : Penerbit Nusa Media
- Hadjon Philipus M., dkk, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Halim Diana. 2004. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Joko Tri, 2010, *Unit Air Baku Dalam Sistem Penyediaan Air Minum*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Joko Tri, 2010, *Unit Produksi Dalam Sistem Penyediaan Air Minum*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Kodoatie, Robert J. Dan Roestam Sjarief, 2008, *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
- Koentjoro, Diana Halim, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor : Ghalia Indonesia
- Kristiyanti, Celina Tri, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika
- Mertokusumo Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta
- Miru Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Raja Grafindon Persada
- Ridwan, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Seojito irawan, 1990, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, jakarta : PT. Rineka Cipta.

Situmorang Victor dan Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta : PT. Rineka Cipta
Sudarsono, 1991, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. Rineka Cipta
Sujanto, 1989, *Norma dan Etika Pengawasan*, Jakarta : Sinar Grafika
Sujanto, 1986, *Beberapa Pengertian Dibiidang Pengawasan*, Bogor : Ghalia Indonesia
Sutrisno Totok, 1996, *Teknologi Penyediaan Air Bersih*, Jakarta : PT. Rineka Cipta
World Health Organization, 2005, *Pedoman Mutu Air Minum Edisi 3*. Diterjemahkan oleh : Widyastuti palupi dan Aprianingsih, Jakarta : Buku Kedokteran EGC

Perundang – Undangan

Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 651/MPP/Kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdaganganannya,
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum

Artikel

Wiwik Yulianingsih, 2010, *Sejarah Kota Mojokerto (1918-1942)*. Universitas Negeri Malang. Malang.